

**MARITAL RAPE**  
**(PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI)**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAAPUSAN**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**Oleh**

**HASMILA**  
**NIM. 10400113081**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasmila  
NIM : 10400113081  
Tempat/tgl lahir : Bulukumba / 10 September 1994  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Yusuf Bauty blok a.18 (manggarupi)  
Judul : Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 13 Juni 2017

Penyusun,

**Hasmila**  
**10400113081**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**MARITAL RAPE (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**", yang disusun oleh Hasmila, NIM 10400113081, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, senin bertepatan dengan tanggal 21 agustus 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 17 Agustus 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Achmad Musyahid, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sohrah, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



## KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabbarakatu

Puji syukur kehadiran Allah swt. karena dengan berkat rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. dan tak lupa pula kita kirimkan salah dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa kita semua dari jaman jahiliyah menuju jaman yang beradab seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi, penulis tak pernah menyerah karena penulis yakin ada Allah swt. yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul **“MARITAL RAPE (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI)PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muh.Syamsir yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, wejangan, semangat, kasih sayang, dan yang pasti selalu memberi apa yang saya butuhkan dari kecil sampai saat ini, kemudian Ibunda Nurlia yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian selama ini dan tidak pernah lupa menanyakan kabar. Terima kasih karena semangat dan dukungan dari Ayahanda dan Ibunda sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian untuk Kakak tercinta saya Haslinda syamsi yang menjadi salah satu motivasiku untuk segera menyelesaikan studi agar bisa termotivasi mengerjakan skripsinya.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor dan seluruh staf dan karyawannya.



3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan wakil Dekan I, wakil Dekan II dan wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang sudah turut berperan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, bukan hanya sebagai ketua jurusan, beliau juga sebagai ayah di kampus yang selalu memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi dan segera wisuda.
5. Bapak Dr. Achmad Musyahid, M.Ag, selaku wakil ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan telah menjadi Penasehat Akademik serta menjadi Pembimbing II skripsi penulis, selain itu beliau sangat baik selama menjadi dosen di beberapa mata kuliah penulis.
6. Ibu, Dr. Sohra, M.Ag selaku pembimbing I skripsi penulis dan memberikan dampak yang besar dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag pembimbing II skripsipenulis dan memberikan dampak yang besar dalam perbaikan skripsi ini
8. Ibu Maryam, selaku staf jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Dan terima kasih untuk Teman-teman yang turut menemani mencari referensi, memberi motivasi dan telah menemani jatuh bangun untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya Irna Dwi ramadhani, Mutia sulfianti, Iin wahyuni, Leo patra
10. Bapak Kepala desa yang selalu memberikan motivasi, serta masukan selama berada Di Desa Bontomarannu, serta bapak Sekdes Muh.Hasriandi dan yang menjadi bapak dan ibu posko yang sangat baik selama saya mengabdikan

di Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, serta teman-teman KKN Angkatan 54 Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kep.Selayar, terkhusus kepada posko Bontomarannu, Muh.Rusdin, Jumaliani, Faturrahmawati, Andriawati, Dzul Ikram dan Kordes terbaik Posko 7 Dummin yang telah menjadi saudara dan membantu saya selama ber-KKN.

11. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2013 yang telah menjadi teman mengerjakan tugas, jalan-jalan dan sebagainya dari awal mahasiswa baru hingga saat ini kita menjadi mahasiswa tingkat akhir.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabbarakatu.



Samata, 7 Juni 2017

Penyusun,

Hasmila

10400113081

di Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, serta teman-teman KKN Angkatan 54 Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kep.Selayar, terkhusus kepada posko Bontomarannu, Muh.Rusdin, Jumaliani, Faturrahmawati, Andriawati, Dzul Ikram dan Kordes terbaik Posko 7 Dummin yang telah menjadi saudara dan membantu saya selama ber-KKN.

11. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2013 yang telah menjadi teman mengerjakan tugas, jalan-jalan dan sebagainya dari awal mahasiswa baru hingga saat ini kita menjadi mahasiswa tingkat akhir.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabbarakatu.

Samata, 7 Juni 2017

Penyusun,

Hasmila

10400113081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI.....	13
A. Bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri .....	14
B. Latar belakang pemaksaan seksual suami terhadap istri .....	25
C. Akibat pemaksaan seksual suami terhadap istri .....	28
BAB III    PERLINDUNGAN HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU. 23 TAHUN 2004.....	35
A. Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual .....	35

B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam .....	53
B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004 .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha



ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fath}ah dan wa&gt;</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan ya>'	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

## 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نَعَم : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali>* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi>* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### 9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *di>nulla>h* بالله *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4

HR = Hadis Riwayat





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**NAMA : Hasmila**  
**NIM : 10400113081**  
**JUDUL : MARITAL RAPE ( Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri ) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Marital Rape (Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri) perspektif Hukum Islam dan UU P-KDRT, dengan sub permasalahan: 1). Bagaimana gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan,? 2). Bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan UU P-KDRT,? dan 3). Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam Dan UU P-KDRT.? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sekilas gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan UU P-KDRT, untuk mengetahui bagaimana Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam Dan UU P-KDRT.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian *library research* karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang Hukum Islam dan UU P-KDRT. Berhubung penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua, dari sisi tindak pidana hukum islam perilaku tindak kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Adapun persamaan antara Hukum Islam dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalama sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah dan rahmah*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan bisa dianggap sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari akad atau transaksi-transaksi yang lain. Akad perkawinan tidak seperti akad-akad yang lain yang telah diatur agama, karena akad perkawinan bersifat mits'aaan galizan (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti halnya telah diungkapkan di dalam al-Qur'an bahwa perkawinan adalah transaksi yang kokoh, teguh, dan kuat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi diantara keduanya.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu<sup>2</sup>

Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran islam menempatkan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>3</sup>

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat di idamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga .

Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.

---

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdemia, 2004), h-19

<sup>3</sup>Abdurahman Thalib al-jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman : Cahaya Hati, 2009) h.84

Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (intimate partner violence ) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (wife abuse). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Dalam undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” -sebagai manusia- yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (*Marital Rape*) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya

---

<sup>4</sup>Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan* (Yogyakarta : Rifka Anisa, 2000), h.28

membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.<sup>5</sup>Bentuk-bentuk marital rape yang terlapor di Rifka Annisa dari kurun waktu tahun 2001-2006 sangat bervariasi, yaitu: Pertama; suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit dan ketika sedang haid. Kedua; suami memaksa hubungan seksual dengan berbagai gaya yang tidak disukai istri atau istri merasa jijik untuk melakukannya. Ketiga; suami memaksa istrinya menonton film blue (BF) dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan adegan yang ada dalam film tersebut. Keempat; suami memaksa hubungan seks dengan istrinya dengan menggunakan terong yaitu memasukkan terong ke dalam kemaluan istri”. Kelima; suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan WIL. Keenam; suami

---

<sup>5</sup>Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1



memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain. Bentuk kelima dan keenam merupakan variasi baru dari marital rape.<sup>6</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemeriksaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’ dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid. Hal yang demikian itu, apakah publik (masyarakat) akan (masih) memandang sebelah mata dengan kasus *Marital Rape* (kekerasan seksual terhadap istri). Sementara kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah di mana seringkali terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlandung dalam konsep agama dan adat.

---

<sup>6</sup>Muyassarotussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-200*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 3, Mei 2008

## ***B. Definisi Operasional***

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan ini, bahwa Dengan demikian, marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri, Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia

Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Terkait kekerasan di ruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (wife abuse), Okrizal Eka Putra, sebagaimana dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan jenis-jenis kekerasan suami kepada istri, yaitu: (a) kekerasan fisik, menyakiti secara fisik, (b) kekerasan psikis, menyakiti secara psikis, melukai perasaan istri, misalnya, (c) kekerasan ekonomi, tidak memberi kebutuhan ekonomi, (d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan (e) kekerasan sosial, memencilkan pasangan dari aktivitas sosial.<sup>7</sup>

## ***C. Rumusan Masalah***

---

<sup>7</sup>Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri (t.t PT.LkisPelangiAksara, 2007), h.11

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu” Bagaimana *Marital Rape* ( pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri ) perspektif Hukum Islam dan UU P-KDRT “

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut

1. Bagaimana gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan
2. Bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan UU P-KDRT
3. Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam Dan UUP-KDRT

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan diatas guna untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sekilas gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan UU P-KDRT
- c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam Dan UU P-KDRT

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian, yaitu:

- a. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah
- b. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam yang mengindahkan bentuk kekerasan-kekerasan seksual suami terhadap istri
- c. Sebagai persyaratan menjadi sarjana.

### ***E. Kajian pustaka***

Kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemungkinan signifikan dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu<sup>8</sup>.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, terdapat beberapa bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam buku Zainuddin Ali menyebutkan bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat anatar seorang pria dengan seorang wanita( suami-istri ) yang mengandung nilai ibadah kepada allah di satu pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri<sup>9</sup>.

Karya Sri Suhadjati Sukri, dkk, kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri tanpa memperdulikan keadaan istri yang mungkin dalam kondisi lemah fisik, maupun non-fisik. Melakukan hubungan seksual

---

<sup>8</sup>Qadir Gassing, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar : Alauddin University Press, 2015 ), h. 13

<sup>9</sup>Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2006 ), h. 51

berkali dalam waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi melakukan hubungan seksual dengan ancaman paksaan.

Hubungan seksual yang dilakukan suami istri, yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami. Sementara itu, istri hanya bersikap pasif, hanya melayani. Tidak pernah mengungkapkan perasaan puas atau tidaknya dalam hubungan seksual.<sup>10</sup>

Karya Ahmad Suaedy menyebutkan bahwa kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga. Pemerkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpasaan baik ekonomi, social maupun cultural, atau karena tidak ada pilihan dan sebagainya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, khususnya buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada bagaimana praktik-praktik pelecehan perempuan terutama yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat di tinjau kembali dengan perspektif Fiqh dan UU-P-KDRT

---

<sup>10</sup>Sri Suhadjati Sukri, dkk, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 158

<sup>11</sup>Ahmad Sunaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* (PT Grasindo, Jakarta, t.th), h. 78

## ***F. Metodologi Penelitian***

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Jadi penelitian kualitatif ini guna menjawab permasalahan mengenai marital rape ( pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri ) perspektif hukum islam. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dipergustakaan

### **2. Pendekatan penelitian**

Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat obyek hukum ialah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan mendasarkan Al-quran maupun Sunnah Nabi yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga

### **3. Sumber data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di dalam penelitian ini peraturan tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif hukum Islam. Kemudian data sekunder literatur-literatur kepustakaan, seperti buk-buku, majalah, surat kabar, internet dan referensi lain yang mendukung.



#### 4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dalam proses pengumpulan datanya hanya melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a) Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubahnya
- b) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah susunan redaksi kata yang sesuai menurut peneliti

#### 5. Tehnik analisi data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah :

##### a. Reduksi data

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat digunakan.

##### b. Penyajian data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terikat dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan agar dapat diberikan kejelasan dan mana data pendukung.

##### c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian peneliti akan memverifikasi hasil penelitian ini kepada ulama yang ada di wilayah penelitian dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI

#### A. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa stateman al-quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Q.S al-Baqarah/ 1:187.

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَاءٌ كَمِ الْرَفَثِ إِلَى الرِّفَثِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلٌ

Terjemahannya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.<sup>1</sup>

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak teransang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tdak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.<sup>2</sup> Ulama' Madzhab memandang 'azl (couitus interruptus) yaitu menarik dzakar (penis) keluar dari fajri (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Semarang: PT.Karya Toha Purna 2002), h.45

<sup>2</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Cet II. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h.113.

bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat Madzhab yaitu : Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan suami istri. Umar berkata:

*Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani diluar farji istri yang merdeka tanpa izinnya.* (H.R.Ahmad dan Ibnu Majah ; Al-Muntaqa II : 564)<sup>3</sup>.

Sejalan dengan melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist diatas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.<sup>4</sup> Dari sini jelaslah perspektif al-quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat diatas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menanggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa/4:34 yang berbunyi :

---

<sup>3</sup>Drs. Moh. Machfuddin. Aladip, “*Terjemah Bulughul Maram*”(Semarang:PT. Karya Toha Putra,t.th.) , h.515

<sup>4</sup>Masdar F. Mas’udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (t.t, t,p t,th), h.117.

تَأْمُولِهِمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالُ  
 مَنْ فَعِظُوهُنَّ نَشَوْرَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا اللَّغِيبِ حَفِظَتْ قَنِينَتٌ فَالْصَّالِحِ  
 لِيَا كَارَبَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا فَلَا أَطَعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضَرُّوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُ  
 كَبِيرَاءُ

Terjemahannya:

“perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka Nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu untuk mencari jalan untuk menyusahkan mereka.”<sup>5</sup>

Dari beberapa teks diatas, baik al-Qur'an maupun hadist kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kala dlarb atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama. Dan hadist-hadist diataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, makam tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah

<sup>5</sup>Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.123

kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan ‘suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain.

Hadis ini menyatakan, bahwa *“menumpahkan mani didalam rahim, tidaklah mengganggu istri yang sedang menyusui dan memberi pengertian bahwa mengeluarkan mani diluar rahim, adalah alah satu mengurangi kelahiran”*.<sup>6</sup>

Hadist ini menyatakan, bahwa adzal terhadap istri merdeka dibolehkan asal mendapat izin dari sang istri. Para ulama berselisihan paham dalam masalah adzal ini. Ibnul Qaiyim dalam Zadul Ma’ad, setelah menyebut hadis-hadis dan mazhab-mazhab ulama yang berpautan dengan masalah ini berkata : ‘Ulama yang membolehkan adzal secara mutlak berhujjah dengan hadis-hadis ini dan dengan alasan bahwasanya istri hanya berhak merasakan kenikmatan persetubuhan, tidak berhak menuntut inzal (tumpahnya mani) kedalam farjinya. Jumhur ulama membolehkan adzal. Ibnu Hazm mengharamkannya. Adapun mempergunakan obat untuk menggugurkan nuthfah sebelum ditiup ruh, maka hukumnya sama dengan adzal. Golongan yang membolehkan adzal, membolehkan ini. Demikian pula hukum istri menggunakan obat yang menghilangkan daya hamil sama sekali. Hukum adzal, walaupun dibolehkan namun dia adalah perbuatan yang tidak disukai (makruh).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* 8, (Cet III.Semarang : PT Pustaka Rizki Putra,2001),h.198-199.

<sup>7</sup>Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* 8, h.200-201

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, pencekikan, pemotongan, penempelengan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>8</sup>

Diharamkan bagi istri menggunakan obat anti hamil tanpa mendapat persetujuan dari suami karena keturunan adalah hak suami dan istri, maka para ulama berpendapat bahwa tidak boleh suami melakukan ‘azel sementara istrinya tidak setuju. Azel adalah menumpahkan mani diluar rahim agar tidak terjadi kehamilan. Akan tetapi jika kedua belah pihak setuju, maka hal tersebut dibolehkan.<sup>9</sup>

Marital Rape adalah kosa kata inggris, gabungan dari berarti “ segala hal yang terkait perkawinan” dan rape yang berarti “pemeriksaan”. Marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Elli N. Hasbianto mendefinisikan Marital Rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau surela seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Farha ciciek mengelompokkan marital rape kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak sia, hubunga seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual

---

<sup>8</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.179

<sup>9</sup>Amin bin Yahya Al yahya Al-wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, (Cet. V. Jakarta : darul haq, 2008). h.89.

dengan cara yang tidak dikehendaki istri. Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan marital rape sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri dan penggunaan obat alkohol terlarang atau minuman beralkohol.<sup>10</sup>

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No.23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi

---

<sup>10</sup>Marlia Milda, *Marital Rape“ Kekerasan Seksual Terhadap Istri”* (Cet.1. Yogyakarta : PT.Lkis Pelangi Aksara 2007 ),h.11-13



3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihaklain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.<sup>12</sup> Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiyaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik,

---

<sup>11</sup>Marlia Milda, *Marita Rape "Kekrasan Seksual Terhadap Istri"* , h.18

<sup>12</sup>Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, t.th), h. 6-7

keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Pada akhirnya pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (marital rape) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang bergabung dalam panitia khusus RUU telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai marital rape dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga. UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur. Menurut penilaian April Danarto, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. Kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda “kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi saya.

---

<sup>13</sup>Marlia Milda Marital Rape “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri*”, h.19

Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulauan mereka karena alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.<sup>14</sup> Dalam sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah :

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin(mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara<sup>15</sup>

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatangi pemikiran mengenai pemaksaan istri oleh suami antara Hukum Islam dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

---

<sup>14</sup>Apri anarto, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Jendela t.th), h.273

<sup>15</sup>Fathul Djannah. Dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, t.th) h.12-13

Seperti yang diketahui, upaya membangun dan memutuskan atas berbagai ketetapan Hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu, sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak didalamnya.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagimereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diuar nikah<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Fathul Djannah.dkk, *kekerasan terhadap istri*, (t.t : t.p, t.th), h.45

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah pelakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata.

Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia.

Pokok denotatif kata *nisa' ukum harsulakum*, isterimu adalah laksana sawah ladang bagimu dan *fa'tu harsakum anna syi'tum*,” maka datangilah sawah ladangmu

bagaimana kamu suka,” terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang “petani” di dalam menabur benih yang baik berkualitas. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap “ladang” yang diamati oleh Allah. Ladang tersebut perlu diberi pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar subur. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan, dengan demikian bukan berarti hak seksualitas perempuan di tiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan terhadap pasangan didalam melakukan hubungan seksual<sup>17</sup>

Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot. Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena

---

<sup>17</sup>Andy Darmawan “*Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an*,” dalam Mochammad Sodik (ed), telaah ulang, hlm 324

gunung es,<sup>18</sup>. Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah hubungan suami istri yang dimaksudkan untuk menyakiti istri. Dengan cara memakai obat terlarang, mabuk, yang menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan badan karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.

### ***B. Latar Belakang Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri***

Dalam kehidupan masyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. Di antara penyebabnya adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. laki-laki bersumber

Pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah

---

<sup>18</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi : Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Cet.1. Bandung : Penerbit Mirzan, 2004), h.154

kekuasaan suami. Istri berkawajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap kekeluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga kalangan ekonomi sangat mapan, hal ini sering kali terjadi. Karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap teks keagamaan.<sup>20</sup> Bukan malah seperti yang apa yang ditafsirkan orang kebanyakan. Kekerasan dalam islam memang

---

<sup>19</sup>Andy Dermawan, “*Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran*”, Dalam Mochammad Sodik, *Tela’ah Ulang Wacana Seksualitas*, (Cet I. Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA, 2004), h-250

<sup>20</sup>Lihat Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Al-Quran*.(t.t: t.p t.th), h-301



diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memiliki unsur pencederaan atau penganiayaan yang tidak dibenarkan.

Di antar potensi yang diberikan oleh allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia.<sup>21</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negar indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
5. Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya ekonomi.

---

<sup>21</sup>Halmin Ilyas, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas, Cet 1*(Yogyakarta, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, Dan Pustaka Pelajar, 2002) h.81

6. Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem adanya kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.<sup>22</sup>

### ***C. Akibat Pemaksaan Seksual Terhadap Istri***

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa

#### **1. Kekerasan fisik**

---

<sup>22</sup>Siti awaliah, *Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska)*, Fakultas Syariah Program Studi Al Akhwal Asy Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011.

Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya, memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang, sampai dengan melakukan pembunuhan, seperti menusuk dan membakar

## 2. Kekerasan psikologis

Merupakan kekerasan emosional berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, menyudutkan, ataupun ancaman. Pelaku sering memutarbalikkan fakta. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah sementara suami selalu berada dipihak yang benar

## 3. Berdimensi ekonomi

Mengontrol perilaku istri tidak memberikan nafka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara melarang istri untuk bekerja menghamburkan uang sementara istri dan anak kekeurangan memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

## 4. Kekerasan seksual

Pemerksaan/pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan katifitas seks tertentu. Pornografi, penghinaan, seksualitas, melalui bahasa verbal dan lain-lain.

Dampak KDRT secara fisik dapat menyebabkan kecacatan yang tetap dan juga kematian, juga dapat berdampak pada psikologis dan sosial dari istri. Kekerasan psikologis dapat merusak harga diri menimbulkan kebingungan dan dapat merusak kejiwaan istri.

Penganiyaan terhadap istri sering disertai pada penganiyaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap istri sering berlanjut

menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada istri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga

Anak-anak yang sering melihat atau mengalami kekerasan cenderung menjadi terlibat dalam lingkaran tersebut. Pola kekerasan ini dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Anak belajar dari kondisi yang mereka saksikan, memperbolehkan melakukan tindak kekerasan ketika merasakan emosi-emosi yang kuat seperti dalam keadaan marah, frustrasi dan stress. Mereka belajar bahwa perlakuan kekerasan merupakan kondisi yang normal terjadi dalam rumah keluarga. Mencintai dan menyakiti merupakan kondisi yang tidak kompatibel. Pengaruh terhadap diri yaitu harga diri yang rendah, orang yang posesif dan memiliki rasa cemburu yang kuat.<sup>23</sup>

Marital Rape bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila saban hari suami menyetubuhi, atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami sedang dalam pengaruh minuman keras, atau obat, atau suami melakukan kekerasan saat senggama.<sup>24</sup> Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar diwajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang capek atau ketiduran. Akibat lain hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah dan capek adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir

---

<sup>23</sup>Irdianto dan Faturochman, "Kekerasan Terhadap istri dan Respon Masyarakat", (t.t, t.p, t.th ), h.60.

<sup>24</sup>Siti Aisyah, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri*, (t.t, t.t.p, t.th), h.37

prematur, dan bahkan keguguran. Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS. Istri yang cedera fisik akibat Marital Rape biasanya tidak mau berobat kedokter ia enggang menjelaskan sebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.<sup>2425</sup>

Adapun dampak jangka panjang yang dialami korban Marital Rape adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena tarauma yang ia tanggung. Trauma adalah “luka jiwa” yang diderita seorang usai mengalami hal yang dirasanya diluar batas wajar atau abnormal. Apabila seorang perempuan (istri) menjadi korban kekerasan, dan lantas mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk (nightmares) atau ingatan-ingatan mendadak atau kejadian sebelumnya (flashback), yang berlanjut terus hingga lebih dari 30 hari, ia sangat mungkin menderita *post-traumatic stress disorder* atau dalam bahasa indonesia dikenal sebagai stres pascatrauma.

Menurut Ellli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala paling umum stres pascatrauma ini, yaitu :

- a. Hyper arousal : gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah seiring perubahan kondisi psikis korban. Gejala paling sering adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang membuat korban ingin bunuh diri. Gejala ini menjadi indikasi adanya persistant

---

<sup>25</sup>Nurul Ilmi Idrus, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t, t.tp, t.th) hlm 70-71

continuing expectation of danger atau perasaan seakan-akan sebuah kejadian buruk terus menerus terjadi.

- b. Intrusion : dalam diri korban terjadi constan reliving of the traumatic event (atau korban tak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami). Gejala ini biasanya berupa nightmares (mimpi-mimpi buruk) dan flashback (ingatan-ingatan yang terus berulang seperti kilas balik), dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan.
- c. Numbing, istilah populernya “mati rasa”. Gejala ini wajar adanya, namun menjadi tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh dan pada akhirnya memencil dan terpencil dari interaksi sosial.

Lebih jauh lagi menurut Elli Nur Hayati karena Marital Rape terjadi berulang dan berkelanjutan, istri (korban) biasanya akan dihindangi karakter sebagai berikut: (a) Rendah diri dan tidak pede; (b) selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami “kalap”; (c) mengalami gangguan reproduksi (Misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran iya merasa tertekan (stres).

Kebanyakan istri korban Marital Rape memang lebih sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri. Mereka berfikir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk anak-anak, suami, dan keluarga besarnya. Cara berfikir demikian menjadi tipikal cara berfikir perempuan (istri) sebagai akibat konstruksi yang menuntut dirinya untuk “selalu berhubungan dengan dan bertanggung jawab terhadap orang lain”. Konstruksi ini terkait erat dengan gender yang memosisikan

perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang kelak bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.

Problem Marital Rape adalah problem kekerasan seksual suami terhadap istri yang mengarah pada tindak pemerkosaan. Sebab, pada Marital Rape tersebut terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual sebagaimana pada tindak pemerkosaan reguler. Meskipun pada pemerkosaan reguler si pelaku dan si korban bukan pasangan suami-istri, tetapi esensinya sama, yakni pemaksaan sebuah hubungan seksual.

Jelas sudah yang melatari terjadinya kasus Marital Rape dan pula dampaknya bagi istri, anak, dan keluarga. Karena dampak fisik dan psikis Marital Rape cukup buruk, sudah saatnya masyarakat, agama, dan negara melarangnya.<sup>26</sup>

Diskriminatif-misoginis yang sekian lama dipraktikkan. Pada masa pra-islam, posisi dan derajat perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat dipertukarkan dan diperlakukan se enak-nya, bahkan melahirkan seorang anak perempuan pun dianggap memalukan. Kala itu, mengubur hidup-hidup bayi perempuan menjadi kebiasaan masyarakat Arab.

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Ini pertanda dari perlakuan hukum yang sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik misoginis – diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. Dalam kurun yang sangat panjang, hingga masa kini, terasa benar, kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan

---

<sup>26</sup>Andy Dermawan, Marital Rape (t.t, t.th, t.tp) hlm.320

masih diposisikan sebagai bagian dari lk (subordinat), dimarginalkan, dan didiskriminasi. Hal ini terlihat nyata pada peran-peran mereka dalam rumah tangga maupun publik.

Para pemikir feminis menyatakan, posisi perempuan yang demikian ini selain ditopang ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustikasi oleh pemikiran agamawan. Ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat Q.S An-Nisa 4 ayat 34

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya :

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.<sup>27</sup>

penafsiran semacam ini sebenarnya ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakal tidak didasari oleh pandangan yang deskriminatif. Akan tetapi secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir Al-Quran, dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.

<sup>27</sup> kementrian Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya , h.96



Superioritas tersebut kini tidak bisa lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas ketimbang perempuan. superioritas laki-laki atas perempuan tidak saja dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga ditentang oleh fakta-fakta sosial, dan ini menajdi keniscayaan tak terbantahkan.<sup>28</sup>

Secara umum bisa dikatakan, pernikahan laki-laki dan perempuan demi membina rumah tangga bahagia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mulia. Pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, sehingga di sini seks bermakna ibadah. Kedua, pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), dan seks disini menajdi kebahagiaan bersama yang manusiawi. Dan ketiga, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks disini mempunyai makna membangun kualiatas komunikasi. Jadi, selain berorientasi ibadah, seksa juga dimaknai sebagai sarana membangun generasi yang baik. Seks adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ar-Razi, misalnya, mengatakan bahwa laki-laki atas perempuan meliputi dua hal : ilmu pengetahuan/pikiran/akal(al-'ilm) dan kemampuan (al-qudrah). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi perempuan, dan laki-laki lebih mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan keras ketimbang perempuan. pandangan yang sama juga dikemukakan para penafsir lain, seperti Ibn Kasir, az-Zamakhshari, al-Qurthubi, dan Muhammad Abduh. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (t.t, t.p, t.th) hlm 20-21

<sup>29</sup> Andy Dermawan, "Marital Rape Dalam Perspektif Al-Quran" dalam Mochammad Sodik (ed), *Telaah ulang wacana Seksualitas* (yokya: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA,2004), hlm.311

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU.23 TAHUN 2004

### *A. Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual*

#### 1. Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis.

Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 –2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005–2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun 2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522 tahun 2007. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan tahun-tahun berikut kenaikan angka KtP berkisar antara 9% –30% (tahun 2005, 30% tahun 2006), 9% dan tahun 2007 11%. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentatnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan.

Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim dilingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah, kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, arena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Ditambah pula adanya beberapa ayat al-Quran yang masih ditafsirkan secara tekstual.

Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang menganut prinsip kesetaraan, partnership (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual suami terhadap istri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya mawaddah dan rahmah. Maka segala perbuatan yang akan menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhadap istri, jika ditinjau lebih dalam, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana islam, mengakibatkan keracuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari.

Inses dan pemerkosaan (kekerasan seksual) bukan hal baru dihari ini dan usia, masalah ini selalu ada dan akan terus ada jika tidak dihadapkan pada wajah. Ini adalah kejahatan serius yang menimbulkan permasalahan keluarga dan masyarakat dan tidak bisa pergi untuk dibahas, karena masalah ini memang ada dalam keluarga muslim itu adalah tentang waktu bahwa kita mengatasinya secara terbuka dan mengambil tindakan untuk mengakhiri.

---

<sup>1</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam2009](http://digilib.uin-suka.ac.id/Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual_Suami_Terhadap_Istri_Dalam_Pandangan_Hukum_Pidana_Islam2009) (2 februari 2017)

Islam memandang kehidupan manusia sebagai karunia dari Allah. Al-Quran berulang kali menekankan kesucian hidup (*hurmat al-hayat*). Kehidupan setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, kabangsaan atau agama adalah layak dihormati. Dalam ayat yang mengacu pada kesucian hidup, istilah yang digunakan adalah ‘nafs’ (jiwa, hidup) dan tidak ada perbedaan dibuat dalam jiwa yang muda atau tua, laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim.

Sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS.al-Maidah ( 5 ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum ) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.<sup>2</sup>

Ajaran-ajaran Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan, karena itu tidak membatasi definisi hidup untuk tubuh fisik saja, tetapi mencakup aspek-aspek mental, emosional dan spritual juga. Ada sekitar 150 ayat mendefinisikan ‘nafs’ istilah dalam berbagai cara membuatnya jelas bahwa konsep ‘hidup’ tidak terbatas pada keberadaan fisik belaka.

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.285

Secara historis, islam telah membahas secara terbuka isu-isu serius dan berusaha untuk memperbaiki tindakan yang merupakan bahaya atau ‘*zulm*’ (yaitu : kekejaman dan kekerasan) dengan martabat manusia. Kehidupan manusia dan menghormati untuk itu telah ditekankan bersikap pelit, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Sebagai aturan umum, islam melarang semua ‘*zulm*’ baik itu fisik, mental, emosional atau spritual: Q.S Al An’am/6:120:

وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

Terjemahannya:

“Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Seungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan”<sup>3</sup>

Dalam Q.S. al-Hujarat/49:11-12 menunjukkan kategoris bahwa bahasa kasar emosional dan perilaku tidak dapat diterima.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah segumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan yang lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan

<sup>3</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya* h.143

adalah (panggilan) yang buruk sesudah imam dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>4</sup>

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati ? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwaallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang.<sup>5</sup>

Dalam pidato terakhir untuk komunitasnya , Nabi saw. Mengatakan: “Hidup anda dan sifat dilarang satu sama lain sampai kau bertemu tuhan pada hari kiamat. Anggaplah kehidupan dan milik seyiap muslim sebagai kepercayaan yang suci. Terluka tidak ada satu sehingga tidak ada yang dapat menyakit anda tidak akan menimbulkan keyimpangan atau menderita apapun.” Nabi saw. Tidak melarang hanya perambahan melanggar hukum kehidupan satu sama lain dan harta, tapi juga menghormati dan menghargai.<sup>6</sup>

Menimbang bahwa kehidupan manusia harus dihargai dan kekejaman dilarang, apa sudut pandang islam tentang inses dan pemerkosaan ? menurut islam, seorang wanita harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan, apakah dia milik bangsa sendiri atau bangsa musuh, apakah dia mengikuti agama anda atau milik suatu agama lain atau tidak memiliki agama sama sekali. Seorang muslim tidak dapat kemarahannya dalam keadaan apapun. Semua hubungan promise cuous telah dilarang padanya, terlepas dari status atau

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya* h. 248.

<sup>5</sup>KementrianAgama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya* ,h.516-517

<sup>6</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id>.(2 februari 2017)

posisi wanita, apakah wanita tersebut adalah bersedia atau mitra tidak mau bertindak. Kata-kata Al-Quran dalam hal ini adalah: Q.S Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>7</sup>

Hukuman berat telah diresepkan untuk kejahatan ini, dan ketertiban belum memenuhi syarat oleh kondisi apapun. Karena pelanggaran kesucian seorang wanita dilarang dalam islam, seorang muslim saja yang melakukan kejahatan ini tidak dapat lolos dari hukuman (maudoodi). Quran telah, dalam berbagai cara dan dalam konteks yang berbeda, terkesan pada laki-laki bahwa mereka harus mengamati batas-batas yang ditetapkan oleh Allah (Hudut Allah) dalam hal wanita dan tidak boleh melanggar batas atau hak-hak mereka baik dalam pernikahan atau perceraian. Dalam semua situasi ini adalah orang-orang yang diingatkan, dikoreksi dan ditegur, lagi dan lagi. Untuk bermurah hati kepada perempuan dan bersikap baik, penuh kasih, jujur dan adil dalam hubungan mereka dengan perempuan. bahkan dalam perceraian, ketika kemungkinan kemarahan dan balas dendam yang tinggi, ditekankan bahwa laki-laki untuk memisahkan dengan rahmat, keadilan dan kemurahan hati.

Melarang kekejaman terhadap anak dan perempuan tampak dari putusan terhadap pembunuhan bayi perempuan dan hak-hak warisan yang diberikan bahkan untuk yang belum lahir, dan diamanatkan bahkan ketika menceraikan istri anda. Ada banyak hadist tentang hak-hak anak untuk menghormati martabat. Hal yang sama berlaku untuk menghormati dan hak-hak belum pernah terjadi sebelumnya diberikan kepada wanita.

---

<sup>7</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.124

Relevan dari ayat-ayat Al-Quran: Q.S an-nisa 4 ayat 119<sup>7</sup>

بَلَىٰ خَلَقَ فَلْيَغْيِرَنَّ وَلَا مُرَبَّهُمْ إِلَّا نَعْمَ إِذَا بَلَىٰ فَلْيَبْتِكُنْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُنِيَّهُمْ وَلَا ضِلَّهُمْ  
 ﴿١١٩﴾ مُبِينًا خُسْرًا نَا خُسْرًا فَقَدْ أَفْلَحَ دُونَ مِّنْ وَلِيٍّ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُ وَمَ

Terjemahannya:

“Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga ternak) lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”<sup>8</sup>

Anda dilarang mewarisi perempuan terhadap keinginan mereka” (Q.S an-Nur/24:

33)

لَمْ يَكُنْ مِمَّا الْكَتَبَ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَحَ الْحَرَامَ وَلَا الَّذِينَ وَلِيستَعْفِفِ  
 عَلَىٰ فِتْنَتِكُمْ تَكْرَهُهُ أَوَّلًا أَتَنكُمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَءَاتَاهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِن فَكَا تَبُوهُمْ أَيْمَنُكُمْ  
 يَمُ غَفُورٌ إِنْ كَرِهْتُمْ بَعْدَ مِّنْ اللَّهِ فَإِنْ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ أَلْدُنْيَا الْحَيَاةِ عَرْضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصُنَا أَرْدَنَ إِنْ أَلْبَغَاءِ  
 ﴿٣٣﴾ رَّح

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah mampu memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jada kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang, (kepada mereka ) sesudah mereka di paksa itu”<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Kementrian Agama R.I. Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 97

<sup>9</sup> Kementrian Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya, h.385



Salah satu cara dalam agama islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untk dimerdekakan, dengan perijian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu buruk menurut penglihatannya sanggup melunasi perijian itu dengan harta yang halal.

Dan jangan, untuk mendapatkan beberapa kesenangan dari kehidupan duniawi ini, memaksa budak perempuan anda kedalam pelancuran jika mereka berkeinginan menikah, dan jika ada orang yang memaksa mereka maka, sesungguhnya, setelah mereka dipaksa (untuk mengirimkan dalam ketikberdayaan mereka), Allah akan jauh pemaaf (kepada mereka)

Selama masa nabi SAW hukuman ditimpahkan pada sipemerkosa dari bukti-bukti soliter dari wanita yang diperkosa dia. Laporan insiden ketika seorang wanita diperkosa. Kemudian, ketika beberapa orang datang, dia mengidentifikasi dan pria itu memperkosanya. Mereka menangkapnya dan membawanya kerasul Allah, yang mengatakan kepada perempuan itu, “*pergilah, karnaallah telah mengampuni kamu,*” tapi pria yang telah memerkosanya, iya berkata, “*batu sampai mati.*” (tirmizi dan abu dawud).

Selama waktu ketika umar adalah khalifah, seorang wanita menuduh putranya abu shahma memperkosa dirinya, dia membawa bayi yang lahir dari insiden ini dengan dia kemesjid dan berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi. Umar (RA) meminta anaknya yang mengakui melakukan kejahatan dan dihukum sebagaimana mestinya dan disana kemudian tidak ada hukuman yang diberikan epada perempuan itu.

Ahli Hukum Islam menafsirkan pemerkosaan sebagai kejahatan dalam kategori *Hirdbah*. Dalam “fiqh-as-sunnah”, hirdbah digambarkan sebagai: “satu orang atau

sekelompokkan orang menyebabkan gangguan publik, pembunuhan, secara paksa mengambil harta atau uang, menyerang atau memperkosa wanita (hatk al'arad) membunuh ternak , atau mengganggu pertanian.”

Ahli hukum terkenal, Ibnu Hazn, telah didefinisikan terluhan hirdbah, mendefinisikan pelaku hirdbah sebagai: satu ‘ yang menempatkan orang dalam ketentuan dijalan, apakah atau tidak dengan senjata, pada malam hari atau hari, di daerah perkotaan atau diruang terbuka, di istana khalifah atau mesjid, dengan atau tanpa kaki, di gurun atau di desa, di kota besar atau kecil, dengan satu atau lebih orang ... membuat orang takut bahwa mereka akan dibunuh, atau punya uang diambil, atau diperkosa (hatk al'arab) apakah penyerangan asalah satu atau banyak. Al-dasuqih berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa wanita untuk berhubungan seks, tindakan itu dianggap melakukan hirdbah. Selain itu, maliki hakim ibnu ‘arabi’ menceritakan sebuah kisah dimana kelompok diserang dan seorang wanita dipartai mereka diperkosa. Menanggapi argumen bahwa kejahatan itu merupakan hirdbah karena uang tidak diambil dan tidak ada senjata yang digunakan, ibnu ‘arabi’ menjawab dengan marah bahwa “ hirdbah dengan bagian pribadi” adalah jauh lebih buruk dari pada hirdbah melibatkan pengambilan uang, dan siapapun lebih suka dikenakan yang terakhir dari mantan.

Kejahatan perkosaan diklasifikasikan buka sebagai sub kategori ‘zinah’ (konsensus perzinahan) melainkan sebagai kejahatan yang terpisah kekerasan dibawah hirdbah. Kalsifikasi ini adalah logis, sebagai ‘mengambil’ adalah milik korban (otonomi seksual korban pemerkosaan itu) dengan kekerasan. Dalam islam, otonomi seksual dan kesenangan adalah hak dasar perempuan dan laki-laki (ghazali).,mengambil dengan paksa

hak seseorang untuk mengontrol aktifitas seksual dari tubuh seseorang dengan demikian merupakan bentuk hirdbah.

Perkosaan sebagai hirdbah adalah kejahatan kekerasan yang menggunakan hubungan seksual sebagai senjata. Fokus dalam peuntutan hirdbah adalah pemerkosa terdakwa dan niat dan tindakan fisik, dan tidak menebak-nebak persetujuan korban pemerkosaan. Hirdbah tidak memerlukan 4 orang saksi untuk membuktikan pelanggaran, bukti, data medis, dan bentuk kesaksian ahli bukti yang digunakan untuk menuntut kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

Tanggapan hukum Islam untuk perkosaan tidak terbatas pada tuntutan untuk hirdbah. Hukum Islam juga menyediakan jalan bagi sipil ganti rugi korban pemerkosaan untuk dalam hukum tentang 'jirah' (luka). Hukum Islam menetapkan hak kepemilikan setiap bagian tubuh seseorang, dan hak untuk komfensasi yang sesuai untuk setiap kerugian yang sah salah satu dari bagian-bagian. Hukum Islam menyebut ini 'Hukum Jirah' (luka) membahayakan organ seksual, karena itu, hak orang dirugikan atas komfensasi finansial yang sesuai di bawah hukum Islam klasik jirah. Masing-masing sekolah hukum Islam menepatakan bahwa dimana seorang wanita dirugikan melalui hubungan seksual (beberapa termasuk perkawinan), iya berhak atas komfensasi keungan untuk merugikan. Selanjutnya, dimana hubungan ini tanpa persetujuan wanita itu, pelaku harus membayar wanita komfesasi dasar untuk membahayakan, serta jumlah tambahan berdasarkan 'diyya' (komfensasi keuangan untuk pembunuhan, mirip dengan kematian salaha pembayaran). Hukum Islam, dengan pengenalan radikal dari hak perempuan untuk memeiliki properti

---

<sup>10</sup> Desnia Alfath, *"Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Islam,"* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

sebagai hak dasar, mempekerjakan egalitar gender dalam bidang yurisprudensi. Bahkan, pada hadist khusus ditunjukkan, untuk mengubah masyarakat muslim awal keluar dari sikap patriarkal komfensasi finansial laki-laki untuk aktifitas seksual perempuan. selama masa nabi muhammad, seorang pria muda berkomitmen dengan istri majikannya. Ayah dari pemuda memberikan 100 kambing dan pembantu sebagai komfensasi majikan, yang menerimanya. Ketika kasus tersebut dilaporkan kepada nabi, iya memerintahkan kembalinya kambing dan pelayan kepada ayah pemuda itu dan dituntut pezina untuk zina (abu daud 1990, 3: Bk 33, No.4430, Bukhari 1985, 8.: Bk 81,.No.815, 821, 826).

Awal islam, terbukti bahwa tidak ada toleransi sikap bahwa aktifitas seksual seorang wanita adalah sesuatu yang harus dipertukarkan, digadaikan, diperguncingkan atau dimiliki oleh orang-orang dalam hidupnya. Tanggung jawab pribadi dari setiap manusia atas tindakan mereka sendiri merupakan prinsip mendasar dalam pemikiran Islam. *Marital Rape* perkawinan perkosaan Quran sangat jelas bahwa dasar dari sebuah hubungan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang antara suami istri, buka kekuasaan atau kontrol. Pemerksaan tidak dapat diterima dalam hubungan seperti itu tidak. Q.S al-Baqarah/2:223:

بَشِّرْ مَلَقُوهُ أَنْكُمْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْفُسَكُمْ وَقَدْ مُوَأَشِئْتُمْ أَنِّي حَرَّتُكُمْ فَأَتُوا لَكُمْ حَرَّتُ نَسَاؤَكُمْ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَ

Terjemahannya:

.isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.35

Catatan dalam terjemahan muhammad asad: “hubungan spritual antara pria dan wanita yang didalilkan sebagai dasar dipisahkan dari hubungan seksual.” (Q.S ar-Rum/30:21).

الْكَفَىٰ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسُكُمْ مِّن لَّكُمْ خَلْقًا أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>12</sup>

Apakah ada pengakuan perkosaan dalam islam ? dalam konteks jirah, maka akan muncul sehingga: dimana ada kerusakan fisik atau penyakit menyebabkan pasangan, mungkin ada klaim untuk komfensasi jiwa. Hukum Jirah memberikan komfensasi atas kerusakan fisik antara pasangan dan mendukung UU Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam diskusi ini komfensasi jira yang tepat, pertanyaan persetujuan pihak yang dirugikan memainkan peran sentral. Beberapa ahli hukum Islam menyetujui dianggap berdasarkan hubungan perkawinan, sementara yang lain mempertahankan bahwa dimana merugikan terjadi itu adalah serangan, terlepas dari persetujuan dan karena komfensasi jatuh tempo. Diera modern kita orang preseden ini dan fokus premi mereka pada persetujuan dan menerapkan prinsip islam ekonomi seksual untuk menyimpulkan bahwa setiap hubungan tanpa persetujuan berbahaya sebagai menghormati ekonomi seksuak Partai tidak mau itu. Jadi, ahli hukum Islam modern dan legislator, mengambil prespektif gender egaliter, mungkin menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengaki

<sup>12</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.400.

perkosaan, dan menetapkan perintah yang sesuai dan kompensasi untuk kerugian pribadi menghancurkan ”(Qureshi). Sebuah hadis sering dikutip dan disalahgunakan yang digunakan untuk tiran perempuan adalah bahwa perempuan tidak dapat dan tidak seharusnya mengatakan tidak kepada suami mereka ketika ia mendekati mereka wanita disarankan untuk tidak berpaling dari suami mereka kecuali jika mereka memiliki priode mereka atau alasan lain yang wajar. Begitu banyak sehingga dia terbuka sukarela kalau suaminya mendekatinya. Dan jika mereka malaikat akan mengutuk mereka. Namun, hadis ini tidak dikutip dengan salah satu pelengkap yang menasihati orang dari pertimbangan yang sama.

Dalam cara yang sama pria disarankan bahwa memenuhi kebutuhan istri mereka lebih diutamakan dari ibadah sukaela. Narratd abdullah bin anr bin al-as: “Muh.saw. diriwayatkan abdullah bin anr bin al-as” Nabi Muhammad Saw. Berkata “wahai abdullah saya telah diberitahu bahwa anda berpuasa sepanjang hari dan berdiri dalam doa sepanjang malam” kataku, “ya ,oh rasul Allah “( bukhari) dia berkata, “ jangan lakukan itu amat cepat dan juga kadang-kadang meninggalkan mereka pada waktu lain, berdiri untuk sholat dimalam hari dan juga tidur dimalam hari.Tubuhmu memiliki hak atas anda dan istri anda memiliki hak atas kamu!.” (bukhari)

Untuk tingkat tertentu alhadist ini digunakan untuk membingungkan dan mengalihkan perhatian dari masalah, karna perkosaan tidak ada hubungannya dengan izin atau kurangnya izin. Dalam aktivitas perkawinan kasar atau dipaksa seksual. Tidak dapat dibenarkan dengan menyalahgunakan hadis ini. Pemerksaan didefinisikan sebagai hubungan seks yang tidak diinginkan, kekerasan dan memaksa, apakah hal ini terjadi dalam konteks perkawinan atau diluar itu.

Definisi pemerkosaan tidak berubah karena hubungan. Hal ini penting untuk tidak mencampuradukkan masalah hak-hak bersama yang pasangan miliki satu sama lain dengan asumsi sesat, menyimpang dan misoginis bahwa perempuan menjadi milik suami. Islam tidak memungkinkan untuk atau mentolerir kepemilikan manusia. Martabat manusia tidak memungkinkan bahwa setiap satu orang memiliki hak untuk memiliki, pikiran/ tubuh/ jiwa, manusia lain dan islam menuntut bahwa semua manusia menghormati kemanusiaan semua orang.

Al-Quran jelas menguraikan orang-orang dengan siapa pernikahan tidak diperbolehkan, kita bisa meramalkan bahwa setiap dari itu hubungan seksual dengan ini akan dapat diterima. Q.S an Nisa/4:23 :

لَا خَوِّنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَخَالَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ  
فِي الَّتِي وَرَبَّيْبُكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرُّضْعَةِ مِنْ ب. وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ  
لَمْ تَلِ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَاحِ ب. دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بَيْنَ دَخَلْتُمْ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ  
وَرَأَى أَنَّ اللَّهَ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَح  
رَّحِيمًا غَف

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibi-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimuitu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dan perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannyah*.12

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan , cucu perempuan dan seterusnya kebawah, demikian juga yang lain-lainnya, sedang yang dimaksud dengan anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama termasuk anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Dilarang untuk anda (dalam pernikahan) adalah ibu anda, putri anda, saudara anda, saudara ayah anda, saudara ibu anda, anak-anak perempuan dari saudara anda, anak-anak perempuan dari saudara perempuan anda, ibu menyusui anda, gadis-gadis yang merawat dari wanita sama seperti anda, ibu dari istri anda, anak-anak perempuan dari istri anda dengan siapa anda memiliki hubungan pernikahan. Jika perkawinan belum disempurnakan, anda dapat menikahi putri. Juga dilarang untuk anda adalah perempuan yang menikahi dengan putra genetik anda. Juga, kamu tidak akan menikah dengan dua saudara pada waktu yang sama. Tetapi tidak putus pernikahan yang ada. Dan allah Maha penyayang.

Dengan demikian, Undang-undang yang sama disebutkan dalam kasus perkosaan akan sama-sama berlaku, dan inses dapat dituntut sebagai kejahatan dalam batas-batas hukum islam.

### ***B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Dapat Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***

#### **a. Perlindungan hukum dalam perspektif HAM**

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Pencabulan (pasal 289-296 ; 2) penghubungan pencabulan (Pasal 286-288).padahal dalam kenyataan apa yang dimaksud



pelecehan seksual, mungkin belum masuk dalam kategori pasal-pasal tersebut. Dari definisi umum tersebut maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan dan penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagaibahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja, mengintimidasi, dan menciptakan, lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban. Kategori kekerasan dalam KUHP sebagaimana tertuang dalam pasal 289 diartikan, membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pengertian diatas tersebut hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan psikis, seperti pada pelecehan seksual,

Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab tindak pidana kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467-504). Terbagi dalam 10 bagian, pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi, pemerkosaan, zina dan perbuatan cabul (pada tindak pidana pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan “perkawinan yang sah” sampai dengan persetubuhan dengan anak-anak). Perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, penganiayaan terhadap hewan, pencegahan kehamilan. Hal-hal yang berhubungan dengan pengguguran kandungan, pengemisan, bahan yang memabukkan sampai dengan perjudian.

Bagaimana dengan persoalan HAM ? dalam konvensi internasional ( khususnya yang lebih diartifikasi pemerintah indonesia), berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabak dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia

(HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat berdasar dan mutlak di perlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

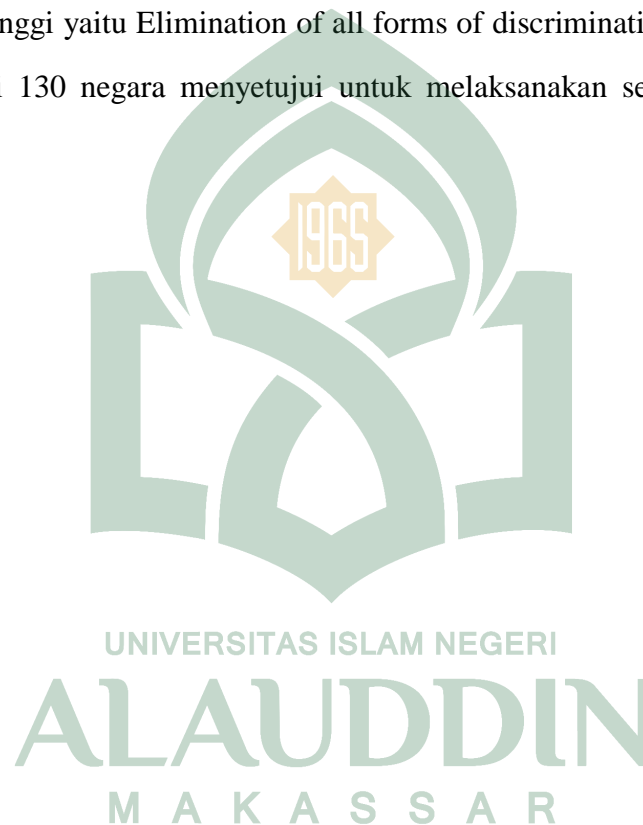
Hak bersifat universal, artinya iya di dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin. Secara Objektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dngan yang lain adalah sama. Teteapi secara subjektif, dalam pelaksanaa tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara.

Sejak awal “Universal declaration Of Human Rights” ini memang dimaksudkan sebagai common standard Of achievement for all peoples and all nations. Ini berarti bahwa deklarasi tersebut hanya memberikan garis besar bagi negara-negara dalam menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Secara yuridis deklarasi tidak meletakkan suatu kewajiban apapun yang bersifat mengikat. Tidak ada satu negara atau kekuatan apapun yang dapat memaksakan dipatuhinya deklarasi ini.

Kendati pun tersebut hanya merupakan anjuran moral saja, pada kenyataannya mempunyai peran yang cukup besar dalam mendorong masyarakat yang tradisional untuk menyusun suatu konvensi , baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM. Beberapa diantaranya : the european convention on human rights 1950, convention relating to the status of refugees 1951, convention on the politic right of women 1953, convention agai nst discrimination in education 1960, international covenant on economic,

social and cultural rights 1996, international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 1996, convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979, convention on the right of the child 1989, dan The Vienna Declaration on Human Rights 1993.

Pada tahun 1979, majelis umum PBB mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu Elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). Lebih dari 130 negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi tersebut.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup><http://www.google.co.id/perlindungan+dan+penegakan+HAM+pelecehan+seksual2008>(5 mei 2017)

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.23 TAHUN 2004

#### *A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Islam*

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan kedalam kategori Marital Rape. Adapun bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut. (1) hubungan seksual yang dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan suami mabuk. Menggauli istri pada saat istri sedang tidur istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak. Dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks. Pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami terhadap istri, ada beberapa statemen al-Quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al-Baqarah/1:187 yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Terjemahannya :

“(para istrimu) dalam pemakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama R.I , *alqur'an dan terjemahannya*, h. 187.

Ayat ini juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan. Penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.<sup>3</sup>

Dari sini jelaslah dalam al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam tinjauan agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Allah ke bumi tentu tidak hanya diturunkan oleh Allah ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar

---

<sup>2</sup>Mazdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Cet.II Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam Bandung, 1997), h. 113.

<sup>3</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Quran dan terjemah*, h. 187.

kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan untuk berkuasa, karenanya allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah.

Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.<sup>4</sup>

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi tersebut. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perangai manusia yang subordinatif, tidak sederajat dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk

---

<sup>4</sup>Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, t.th). h.214-215

memahami fakta-fakta sosial dan kesadaran eksternal agar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.<sup>5</sup>

Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiakan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan kehendak. Karena itulah juga diperlukan “liberlisasi” yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba allah yang mengikuti aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu-belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dengan tuhan.<sup>6</sup>

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu.

---

<sup>5</sup>Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, h.220-221.

<sup>6</sup>Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, h, 225

Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan. jika di Barat muncul berbagai aliran feminisme dengan segala ambisinya, maka melihat feminisme dari kecamata islam adalah juga penting dan menarik aliran pemikiran baru untuk menciptakan sistesis dari kegagalan feminis barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya.

Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan.<sup>7</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa feminis yang mesti diperhatikan oleh perempuan antara lain ; Q.S. an-Nisaa': 11, 34, 127-129; Q.S. al-Baqarah: 32, 223, 231; al-Ahzab; 33; Q.S. al-hujuraat: 13; Q.S. an-nahl: 97; Q.S. al-A'raaf: 172; Q.S. al-Muntahanah: 12; Q.S. al-Imran: 195; dan masih banyak lagi ayat-ayat lain sejalan dengan pesan-pesan untuk feminis. Q.S. an-Nisaa' ayat 127 sampai 129 telah memperlihatkan betapa al-Quran telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya masing-masing. Yang satu istri (perempuan) dan yang lainnya suami (laki-laki).

---

<sup>7</sup>Asmaeny Azis, feminisme profetik, (t.t: t.p, t.th) h. 236-237



Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih kordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh manakah proses transendensi ini berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transendentif bagi perubahan sosial. Karena itu, menarik garis paralelisme sejarah rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak berkeprimanusiaan dari derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termaginalkan.<sup>8</sup>

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa'/4:34 yang berbunyi :

---

<sup>8</sup>Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, h. 244-245

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيتٌ ۖ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahan:

“perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka”.<sup>9</sup>

Dari teks al-Qur'an ai atas kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kala dlarb atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan akan dilegitimasi agama.

Dan hadist-hadist diataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus menyebutkan “ saya kadangkala betul-betul tidak bergairah tetapi ia tetap saja memaksakan keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Semakin saya menunjukkan penolakan, semakin ia memaksa untuk dilayani<sup>10</sup>.

Produk pemikiran manusia sangat memiliki pengaruh yang besar dalam studi gender, bahkan dianggap sebagai penghambat terhadap gerakan-gerakan gender maupun feminis. Hal ini disebabkan lebih dominannya umat-umat modern saat ini,

<sup>9</sup>Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h 1.123

<sup>10</sup>Nurul ilmi idrus, *Marital Rape*, (yogyakarta ; P3PK UGM-FF, 1999), h. 48.

untuk mengkonsumsi produk tersebut secara langsung, tanpa kritik historis, dan juga pemahaman produk manusia disalah pahami sebagai ajaran islam yang asli, yang mutlak kebenarannya, baku dan bahkan hal itu dipahami sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Produk pemikiran dalam hal ini adalah (kontruksi fiqh) yang terwadahi dalam simbol kitab kuning, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi satu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena islam di indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan.<sup>11</sup> Dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notebenennya mengambil jarak secara polotik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan beground seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran fiqh, untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi dipelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan-persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Sehingga muncul bias-bias gender

---

<sup>11</sup>Lihat Masdar F. Masudi, *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*.(t.t, t.p, t.th), h.224.

yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, dan lain-lain.

Hal yang menjadi amat dikecewakan adalah ketika pemahaman terhadap fiqh tersebut hanya berhenti pada teksnya, maka akibat yang harus diterima adalah akan banyak korban dari ajaran-ajaran tersebut mestinya hal itu tidak diinginkan, oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bukan semata-mata teks, namun selama ini logika teks yang lebih mengedepan

Mazdar f. Masudi telah mencoba untuk menginventarisasi beberapa masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penuluran terhadap teks itu sendiri. Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Dari kitab Makarim Al akhlak oleh Sheh Radhi Al Din. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka allah akan menyusupkan maukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah, tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajaran tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam kitab uqud allujjain. Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan sesuatu

teologi kristen alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan.<sup>12</sup>

Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran islam pada pembersihan dari bias laki-laki dan juga Fatima Mermisi yang menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.

### ***B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut UU No.23 Tahun 2004***

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini.

UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>12</sup>Masdar F. Masudi, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Inis, 1993), h. 168.

Kekerasan seksual berat yang terdiri :

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemaksaan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut

dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*Marital Rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *Marital Rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*Marital Rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian peneliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk pemaksaan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. Kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda

“kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi peneliti. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan finansial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.<sup>13</sup>

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindakan pemaksaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisoanl lain terhadap perempuan diluar hubungan suami istri, serta pemaksaan yang berhubungan dengan eksploiatasi.
2. Pemaksaan seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termask perkosaan, penyalah gunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. Pemaksaan secara seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.<sup>14</sup>

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki,

---

<sup>13</sup>Apri Danarto, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, (Yogyakarta: jendela, t.th), h.273.

<sup>14</sup>Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, t,th), h.12-13.



melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.<sup>15</sup>

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bag mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidak acuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk pemaksaan seksual.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan menyimpang hubungan seks suami terhadap istrinya. Pemaksaan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berbagi upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena

---

<sup>15</sup>fathul djannah, dkk, kekerasan terhadap istri, (Yogyakarta LkiS, t.th.), h.15

<sup>16</sup>fathul djannah, dkk, kekerasan terhadap istri, (Yogyakarta LkiS, t.th.),h. 45

berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. Semua penilaian itu menunjukka bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia

menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup>A.Nunuk P. Murniati, *Getor Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, t.th) , h.235-238

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam islam dengan alasan pertama, dari sisi *maqahid asy-syari'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan dan beberapa poininti dari masalah *ad-Daruriyyah* yaitu, *hifs an-nafs* dan *hifs an-nasl*. Dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua, dari sisi tindak pidana hukum islam perilaku tindak kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
2. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah ( melalui aparat penegak hukumnya ), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.
3. Adapun persamaan antara Hukum Islam dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalama sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah dan rahmah*.

## B. SARAN

1. Merubah pandangan budaya yang selalu menempatkan dalam posisi *subordinat* dan *marginal* menyebabkan perempuan tidak dapat mandiri dan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri
2. Perlunya pemahaman ulang terhadap interpretasi teks-teks agama sehingga tidak adanya suatu penjustifikasian dalam pengaplikasian hukum yang tersirat atau pun tersurat di dalam teks-teks agama tersebut. Yaitu dengan melakukan dialog dan sosialisasi terhadap penafian *dogmatisasi* “berbagai pemahaman sebagai suatu bentuk yang baku, statis dan tidak bisa dikritisi dengan merekonstruksi, reinterpretasi bahkan dengan mendekroktusinya” terhadap para ahli mufassirin atau ahli fiqh
3. Dalam setiap keluarga harus ada tempat untuk dialog atau interaksi aktif dari masing-masing pihak, karena hal tersebut merupakan inti dari keberhasilan suatu keluarga dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ala'dip, Moh. Machfuddin., "*Terjemah Bulughul Maram*" Semarang , (PT. Karya Toha Putra) ,
- Alfath, Desnia , "*Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*, " Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2000
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2006 ) ,
- Al-wazan, Amin bin Yahya Al yahya, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, (Cet. V .Jakarta : Darul Haq). 2008.
- Al-jazairi, Abdurahman Thalib, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman : Cahaya Hati, 2009)
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 8*, t.t: t.p, t.th.
- <sup>28</sup>Ar-Razi, misalnya, mengatakan bahwa laki-laki atas perempuan meliputi dua hal : ilmu pengetahuan/pikiran/akal(al-'ilm) dan kemampuan (al-qudrah). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi perempuan, dan laki-laki lebih mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan keras ketimbang perempuan. pandangan yang sama juga dikemukakan para penafsir lain, seperti Ibn Kasir, az-Zamakhshari, al-Qurthubi, dan Muhammad Abduh. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, t.t, t.p, t.th
- Koleksi Hadist-Hadist Hukum 8*, Cet 3. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra t.th.

Awaliah, Siti, *Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska)*, Fakultas Syariah Program Studi Al Akhwal Asy Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011.

Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, t.th

Danarto, Apri, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, Yogyakarta : Jendela t.th.

Dermawan, Andy, “*Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur’an*,” dalam Mochammad Sodik (ed), telaah ulang,

----- “*Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran*”, Dalam Mochammad Sodik, *Tela’ah Ulang Wacana Seksualitas, Cet I Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA*, 2004.

----- *Marital Rape Dalam Perspekif Al-Quran*.t.t: t.p t.th.

Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LkiS, t.th.

Gassing, Qadir, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar : Alauddin University Press, 2015.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>.(2 februari 2017)

<http://books.google.co.id/books?id=04TZAAAAMAAJ&q=dampak+umum+kdr&dq=dampak+umum+kdr&html> (31 mei 2017)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/Tindak> *Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* 2009 (2 februari 2017)

Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape*, Yogyakarta : P3PK UGM-FF, 1999.

Ilyas, Halmin, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas, Cet 1(Yogyakarta, PSW IAIN Yokyakarta, The Ford Foundation, Dan Pustaka Pelajar, 2002)*

Irdianto dan Faturachman, "Kekerasan Terhadap istri dan Respon Masyarakat", t.t, t.p, t.th.

Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Karya Toha Purna 2002.

Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdEMIA, 2004.

Masudi, Masdar F., *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet.II. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, ), 1997.

----- *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, t.t, t.p t.th. .

----- *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*.(t.t, t.p, t.th), h.224.

----- *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Inis 1993.

Milda, Marlia, *Marital Rape " Kekerasan Seksual Terhadap Istri"* Cet.1. Yogyakarta : PT.Lkis Pelangi Aksara, 2007.

Muhlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi : Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet.1.Bandung : Penerbit Mirzan. 2004.



Murniati, A.Nunuk P., *Getor Gender*. Magelang: Indonesia Tera, t.th.

Muyassarotussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-200*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 3, Mei 2008

Nurhayanti, Elli, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta : Rifki Anisa, 2000.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dasar perakwinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara,t.th.

Sukri,Sri Suhadjati, dkk, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 2002.

Sunaedy, Ahmad, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: PT Grasindo.t.th.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1